

Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Pasca Pemilihan Umum 2009

Esty Ekawati

Pusat Penelitian Politik LIPI

esty1wati@gmail.com

Abstrak

Pelebagaan partai politik merupakan suatu upaya menjadikan partai itu solid. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai yang lahir di era reformasi dan dalam perjalanan sepuluh tahun pertama mengalami tiga kali konflik internal yang berujung dengan perpecahan. Pasca pemilu 2009, PKB melakukan pembenahan struktural dan pelembagaan partai melalui pemantapan ideologi, kaderisasi dan rekrutmen, dan menciptakan kohesivitas atau soliditas partai dengan membangun kembali komunikasi dan silaturahmi dengan pihak-pihak yang merupakan konstituen potensial PKB.

Kata Kunci: pelembagaan partai, ideologi, kaderisasi, kohesivitas

Latar Belakang

Terbelenggunya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia selama pemerintahan Soeharto terutama dalam aspek politik telah menimbulkan suatu semangat untuk menciptakan Negara yang lebih demokratis yang menghargai hak-hak politik dan partisipasi publik. Reformasi menjadi momentum awal dimana demokrasi mulai dikembangkan di Indonesia demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Langkah awal demokratisasi dilakukan dengan memberikan kebebasan bagi warga Negara untuk mendirikan partai politik, Hal ini diwujudkan dengan menjamurnya jumlah partai politik. Menjelang Pemilu 1999, ada 148 partai mendaftarkan diri ke Kementerian Kehakiman dan 141 partai memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Namun, setelah melalui proses seleksi, hanya 48 partai politik yang lolos verifikasi untuk bisa ikut dalam kontestasi Pemilu 1999. Sebagai pilar demokrasi, eksistensi partai politik merupakan hal penting sebagai bentuk pengakuan atas kebebasan berserikat dan berkumpul seperti yang tertuang dalam konstitusi. Akan tetapi, dalam perjalanannya, keberadaan partai yang jumlahnya begitu banyak tidak serta merta menjadikan suatu negara bisa dikatakan demokratis. Akan bisa dikatakan demokratis, jika partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berkompetisi secara bebas dalam pemilu.

Dalam menjalankan fungsinya, partai politik tidak akan terlepas dari konflik internal partai. Hal ini dikarenakan begitu banyak kepentingan bermain disana. Tak sedikit konflik kepentingan menyebabkan fragmentasi dan berujung pada kondisi pembentukan partai baru oleh pihak-pihak yang kecewa. Sebagai contoh fragmentasi yang terjadi pasca Pemilu 1999 dan berakhir pada pembentukan partai baru yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terpecah dan terbentuk partai baru yaitu Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Sejumlah kader Golkar yang kecewa juga keluar dari Golkar dan membentuk partai baru seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerindra dan yang terakhir adalah Partai Nasdem.¹ Sebelum itu, perpecahan juga terjadi di partai-partai Islam seperti yang terjadi di PKB dimana akibat konflik internal maka sejumlah Kyai mendirikan PKNU. PAN juga didera perpecahan yang melahirkan Partai Matahari Bangsa (PMB) dan juga PPP yang melahirkan Partai Persatuan (PP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Perpecahan tersebut terjadi bukan tanpa alasan, dari alasan ideologi, pembagian kursi yang tidak merata hingga persoalan kepemimpinan partai. Konflik internal partai yang tidak menemukan kata konsensus menjadi pekerjaan rumah bagi partai dalam upaya demokratisasi partai di Indonesia.

Konflik terjadi manakala terjadi benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Maswadi Rauf berpendapat bahwa konflik politik mempunyai konotasi politik yakni mempunyai keterikatan dengan negara, pemerintah, para pejabat politik/pemerintah dan kebijakan.²

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai yang lahir di era Reformasi. Partai ini lahir berdasarkan inisiasi dari tokoh-tokoh organisasi keagamaan Islam yang besar yaitu Nahdhatul Ulama. Pada pemilu 1999, PKB memperoleh suara yang cukup signifikan yaitu lebih dari 12 persen. Hasil ini menjadikan PKB memiliki posisi tawar yang diperhitungkan dalam pencalonan Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai Calon Presiden yang dipilih oleh MPR tahun 1999. Dalam perjalanannya, langkah politik PKB untuk menjadi partai yang diperhitungkan tidak berjalan mulus. Konflik internal partai menjadi jalan terjal yang harus dilalui PKB selama dekade pertama.

Data menunjukkan bahwa PKB mengalami setidaknya tiga kali konflik internal yang berdampak pada penurunan suara dari pemilu ke pemilu. Konflik internal pertama terjadi pada

¹ Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm. 4

² Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Pemjajagan Teoritis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hal. 19-20.

tahun 2001 antara Gusdur dan Matori Abdul Jalil. Konflik kedua terjadi pasca pemilu 2004 antara Gusdur dan Alwi Shihab. Konflik ketiga terjadi cukup memanas antara Gusdur dan Muhaimin Iskandar tahun 2008 yang kemudian berdampak pada terbentuknya dua kubu PKB dan berimbas pada penurunan perolehan suara PKB yang cukup drastis pada pemilu 2009.

Pembahasan mengenai PKB sudah cukup banyak dikaji. Seperti yang dilakukan oleh Firman Noor (2015) yang melihat tingkat perpecahan dan soliditas Partai Islam seperti PKB dan PKS dilihat dari aspek pelebagaan partai.³ Kamarudin (2008), yang menguraikan konflik Internal di PKB⁴ dan kajian Pusat Penelitian Politik LIPI (2008) mengenai pelebagaan partai politik pasca Orde Baru dimana salah satu bab-nya membahas mengenai pelebagaan PKB.⁵ Akan tetapi, kajian-kajian tersebut dilakukan dalam rentang waktu dekade awal PKB berdiri. Sedangkan tulisan ini akan membahas mengenai pelebagaan PKB pasca Pemilu 2009 dimana PKB masih konsisten memegang nilai-nilai yang menjadi ideologi partai, bagaimana PKB melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik, dan bagaimana PKB mampu mengatasi konflik internal demi menjaga kohesivitas partai yang akhirnya semua hal ini berpengaruh pada perolehan suara PKB pada pemilu 2014.

Belajar dari pengalaman tiga kali konflik, PKB mencoba untuk menata kembali struktur partai dan proses pelebagaan partai demi mewujudkan kohesivitas/soliditas partai agar tak lagi terfragmentasi. Dari kenyataan ini, penulis ingin mengkaji “Sejauhmana proses pelebagaan partai yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca pemilu 2009?”

Kerangka Pemikiran

Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik jika rakyat ingin menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik lainnya. **Neumann** mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.⁶ Sedangkan menurut **Giovanni Sartori**, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik.⁷

³ Firman Noor., *op.cit*

⁴ Kamarudin, Konflik Internal PKB., dalam Firman Noor., *op.cit*

⁵ Lili Romli (ed), Pelebagaan Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi kasus Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS, (Jakarta: LIPI Press, 2008), hlm. 71-114

⁶ Sigmund Neumann, "Modern Political Parties" dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.404

⁷ Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*, (UK: ECPR Press, 2005), hlm. 57

Membahas partai politik tentu tidak terlepas dari pembahasan pelebagaan (*Institutionalization*). Sejumlah ahli mendefinisikan pelebagaan partai politik, seperti Samuel Huntington yang mendefinisikan "*Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability*".⁸ Huntington mengidentifikasi empat dimensi dari Institusionalisasi yaitu: 1) *Adaptability* (kemampuan beradaptasi) berkaitan dengan umur partai termasuk kemampuan untuk bertahan dalam sebuah sistem politik, baik menjadi wakil rakyat, menjadi oposisi maupun bagian dari pemerintahan. 2) *complexity* (kompleksitas) berkaitan dengan keberadaan sub-unit organisasi dan hubungan di dalamnya. 3) *Autonomy* (otonomi) merujuk pada tingkat perbedaan dari kelompok sosial lainnya dan pola tingkah laku. 4) *coherence* (koherensi), merujuk pada tingkat konsensus internal partai, termasuk kemampuan untuk menyelesaikan persoalan internal partai.⁹

Angelo Panebianco mendefinisikan pelebagaan/institusionalisasi adalah cara bagaimana organisasi menciptakan soliditas (*the way the organization solidifies*).¹⁰ Sedangkan Randall dan Svasand mendefinisikan pelebagaan sebagai "*the process by which the party becomes establish in term both of their integrated patterns of behaviors and of attitudes or culture*". Randall dan Svasand menguraikan empat dimensi untuk mengukur pelebagaan partai yaitu: 1) derajat kesisteman yaitu rutinitas interaksi diantara para anggota berdasarkan aturan main yang berlaku. 2) infusi nilai yang mengacu pada aktor-aktor dan pendukung partai memiliki identifikasi dan komitmen terhadap partai. Hal ini penting untuk menjamin kesuksesan partai menciptakan budaya dan sistem nilai yang penting dalam mewujudkan soliditas partai. 3) Otonomi (dalam pengambilan keputusan) yaitu kemampuan dalam proses pengambilan keputusan internal partai. 4) Reifikasi merujuk pada eksistensi partai di benak masyarakat.¹¹

Dari aspek-aspek institusionalisasi tersebut, dalam makalah ini, indikator yang akan digunakan untuk melihat pelebagaan di PKB yaitu 1) Ideologi, 2) perkembangan keanggotaan/kaderisasi, dan 3) kohesivitas dalam partai. Pemilihan tiga indikator tersebut bukan untuk mengeneralisir baik buruknya proses pelebagaan PKB namun hanya untuk melihat bagaimana PKB melakukan pelebagaan partai pasca konflik 2008 dan pasca pemilu 2009 dilihat dari aspek ideologi, kaderisasi dan kohesivitas partai.

Kohesivitas atau soliditas atau koherensi dalam makalah ini didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan keberadaan dan keutuhan. Soliditas partai sebagai sebuah sistem

⁸ Samuel Huntington, *Polirtical Order in Changing Societies*, dalam Vicky Randall and Lars Svasand, *Party Institutionalization in New Democracies*, (London: Sage Pulication, 2002), Party Politics, Vol.8, No.1, hlm.10

⁹ *Ibid.*, hlm.10

¹⁰ Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and power*, dalam *Ibid.*, hlm.10

¹¹ Vicky Randall and Lars Svasand, *Party Institutionalization in New Democracies*, (London: Sage Pulication, 2002), Party Politics, Vol.8, No.1, hlm.12-14

dikaitkan dengan kapasitas atau kemampuan sebuah partai untuk menyatukan dan mempertahankan seluruh sub-sistem di dalam partai politik yang memastikan bahwa seluruh unsur bekerja bersama untuk mencapai tujuan.¹²

Mengapa ideologi, kaderisasi dan kohesivitas partai yang dipilih? Karena sejak pembentukannya tahun 1999, PKB mengalami tiga kali konflik internal yaitu tahun 2001, 2005 dan 2008 yang berakibat pada penurunan perolehan suara hasil pemilu. Akan tetapi, pasca konflik 2008, PKB nampaknya mulai bekerja maksimal untuk memperbaiki fungsi rekrutmen dan manajemen konflik serta mencoba beradaptasi dengan sistem politik demi mewujudkan soliditas internal partai. Selain itu, dengan tetap konsisten memegang ideologinya, hasilnya, Pemilu 2014, PKB mendapat peningkatan suara yang signifikan. Aspek-aspek kelembagaan yang diuraikan oleh Huntington, Panebianco dan Randal&Svasand digunakan untuk melihat kecenderungan yang terjadi di PKB.

Pembahasan

Pasca reformasi, kebebasan membentuk partai politik adalah salah satu agenda reformasi yang diperjuangkan supaya demokratisasi dapat tercapai. Menjelang Pemilu 1999, partai politik bermunculan dengan berbagai ideologi dan *platform*, tidak terkecuali partai-partai politik yang mengusung ideologi Islam. Semasa reformasi, pada tahun 1998 Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid mendeklarasikan partai politik baru, PKB, yang secara organisatoris terpisah dari NU. Meskipun secara organisatoris PKB tidak memiliki ikatan struktural dengan NU namun secara emosional partai ini sangat dekat dan lekat dengan warga NU, terbukti dalam besarnya dukungan para tokoh dan ulama NU yang secara langsung terjun dalam politik atau sebagai juru kampanye dalam Pemilu.¹³ Bahkan lambang/symbol yang digunakan PKB mirip dengan NU, serta struktur organisasi PKB sama dengan NU yaitu dewan Tanfidziyah dan Dewan Syariah.

Sejarah PKB

Pasca reformasi dan euphoria pendirian partai politik berimbas juga ke organisasi sosial keagamaan Islam dimana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai banyak mendapat usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air untuk mendirikan partai. Tercatat ada 39 nama parpol yang di usulkan, nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Adapun unsur-unsur yang

¹² Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2015), hlm.25

¹³ Ahmad Zaro, *Tradisi Intelektual NU*, (Jogjakarta: LKiS, 2004), Hlm.64

terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang Sembilan dan warna hijau, ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH.M.Cholil Bisri dan PWNJ Jawa Barat.¹⁴

Banyaknya masukan dan tuntutan pendirian partai dari kaum Nahdliyin tersebut, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini dikarenakan NU terbatas oleh hasil muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan praktis. Akibat kegamangan sikap PBNU akhirnya banyak pihak dan kalangan NU yang tidak sabar langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantaranya yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon.¹⁵

Melihat atusiasme warga Nahdliyin di daerah, PBNU kemudian mengadakan rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima tersebut diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin (Rais Syuriah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota; KH.M.Dawam Anwar (katib Aam PBNU), Dr.KH.Said Aqil Siradj,MA (Wakil Katib Aam PBNU), HM. Rozy Munir, SE,M.Sc (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekertaris Jenderal PBNU).¹⁶

Berdasarkan rapat Tim Lima maka dideklarasikanlah parpol yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diharapkan dapat menampung aspirasi warga NU pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Deaklarasi ini dilakukan pada tanggal 23 Juli 1998 di kediaman KH.Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PBNU) di Ciganjur Jakarta Selatan. Deklaratornya terdiri dari tokoh-tokoh kunci dalam struktur PBNU yaitu: KH.Ilyas Rukhiat (Tasikmalaya), KH.Munasir Ali (Mojokerto), KH Mustofa Bisri (Rembang), K.H Muchit Muzadi (Jember) dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Ketua Umum PBNU.¹⁷

Perolehan suara PKB sebagai partai politik baru yang mendapat suara cukup signifikan dibanding partai politik yang berlabel Islam lainnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor dana ada faktor-faktor lain seperti, *pertama*, pengakuan dan pemberian restu oleh PBNU atas pendirian PKB. *Kedua*, peran pesantren NU (dan para kyai sebagai pengasuhnya) sebagai jaringan komunikasi politik yang efektif. *Ketiga*, sosok dan peran Gus Dur yang memiliki reputasi yang baik

¹⁴ Lihat: <http://pkbkedungreja.com/2011/03/sejarah-berdirinya-pkb.html>. diakses pada 14 Februari 2016, pukul 14.30 wib

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Lihat: <http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian>. diakses pada 14 Februari 2016, pukul 14.35 wib

¹⁷ A. Effendi Choirie, "Menjadikan PKB Partai Nasionalis dan Terbuka" dalam Lili Romli, Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde Baru, (Jakarta: LIPI Press, 2008), hlm.72

sehingga bisa menarik simpati dari mayoritas warga NU untuk mendukung dan memilih PKB.¹⁸ Meskipun dalam perjalanannya, kelahiran PKB yang difasilitasi oleh PBNU ini tidak serta merta disepakati oleh seluruh warga NU. Setelah PKB dideklarasikan ternyata masih ada warga NU yang tidak mendukung dan bergabung dengan PKB. Diantara mereka bahkan tetap berada di PPP dan ada juga yang tetap di Golkar, bahkan sebagian dari pihak yang tidak menerima kebijakan PBNU tentang PKB, justru mendirikan partai sendiri seperti Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang mengusung KH Solahudin Wahid (adik Gus Dur) sebagai ikon partai itu, Partai Nahdhatul Ulama (PNU) oleh KH Syukron Makmun, dan SUNI yang juga menuntut restu dari PBNU.¹⁹

Ideologi PKB

Meskipun dilahirkan oleh kalangan NU, PKB tidak didesain sebagai partai yang menempatkan agama sebagai ideologi atau lebih khusus lagi sebagai partai Islam. PKB, sebagaimana dituangkan dalam Mabda Syiasi adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.²⁰ Islam yang dianut PKB adalah Islam moderat dan inklusif yang kemudian mendasari platform PKB sebagai partai terbuka. Adapun kehadiran PKB merupakan kelanjutan dari tradisi pemikiran dan gerakan NU yang berpijak pada keislaman yang moderat dan keindonesiaan yang multikultural.²¹ Secara ideologi, PKB masih dari awal kelahirannya hingga 4 kali pemilu masih konsisten memegang ideologi terbuka dan inklusif. Dalam prakteknya pun, PKB melibatkan kalangan non-Muslim dalam struktur partai dan calon anggota legislatif. Konsistensi dan komitmen PKB ini mengkondisikan bahwa PKB mampu memberikan landasan bagi pelebagaan partai dalam aspek ideologi.

Kaderisasi PKB

PKB, meski menyatakan diri sebagai partai terbuka dan inklusif, namun karena ia lahir dari organisasi besar Nahdhatul Ulama maka tentu sebagian besar kader PKB adalah warga Nahdliyin. Pada masa awal pendiriannya hingga menjelang pemilu 2004, PKB terkesan sebagai partai keluarga Gusdur. Menurut Effendi Choirie, terdapat dikotomi dalam PKB yaitu antara keturunan Gus (berdarah biru NU) yang mempunyai hak istimewa dan kelompok “non Gus” yang tidak memiliki

¹⁸ Dr. Faizal Ismail dkk, “NU, Gusdurisme dan Politik Kyai” dalam Ibnu Hajar, *Kiai ditengah Pusaran Politik, Antara Petaka dan Kuasa*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2009, hlm.109

¹⁹ KH Abdul Muchit Muzadi, “NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran” dalam *Ibid.*, hlm.105

²⁰ Mabda Syiasi Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta; DPP PKB, 2004

²¹ Yudi Latif, “Transformasi PKB: Dari Jaringan Kulturalke Jaringan Fungsional” dalam Lili Romli(ed)., *op.cit*, hlm.73

keistimewaan. Dikotomi ini cukup berpengaruh dalam upaya kader meniti karir politik di PKB baik sebagai struktur partai maupun calon anggota legislatif.²²

Persoalan kaderisasi di PKB pada dasarnya tidak begitu sulit karena PKB berafiliasi dengan organisasi-organisasi seperti Fatayat NU, Muslimat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Angkatan Muda NU, Pemuda Anshor Garda Bangsa dan organisasi sayap perempuan PKB (PPKB). Kader-kader potensial inilah yang nantinya mengisi jabatan-jabatan structural partai maupun menjadi calon anggota legislatif. Sebagai partai politik, PKB memiliki sistem rekrutmen calon anggota legislatif sendiri. Berdasarkan kajian LIPI (2005), rekrutmen calon anggota legislatif pada Pemilu 2004 yang dilakukan oleh Tim Mantap lebih pada faktor-faktor senioritas, loyalitas, akhlakul karimah, pengalaman organisasi dan faktor ketokohan. Sedangkan faktor pendidikan dan pengetahuan dasar berpolitik kurang diperhatikan. Yang mendapat skor penilaian tertinggi adalah faktor senioritas dan pengalaman organisasi di PKB.²³

Akan tetapi, setelah didera konflik pada 2001, 2005 dan 2008 yang berimbas pada fragmentasi partai dan penurunan suara PKB pada Pemilu 2004 maka PKB mulai berbenah. Pasca konflik internal 2008 yang berujung pada perpecahan PKB menjadi dua kubu, akhirnya PKB kubu Muhaimin Iskandar yang notabene diakui oleh Kementrian Hukum dan HAM sebagai partai yang sah ikut Pemilu 2009 menata ulang struktur partai tak terkecuali kaderisasi dan pola rekrutmen.

PKB sebagai partai yang terbuka dan pluralis tidak membatasi keanggotaan berdasarkan agama, ras etnis dan gender. Oleh sebab itu, PKB memberikan kesempatan bagi caleg yang berasal dari agama lain (selain Islam) untuk bisa bergabung bersama PKB baik di jajaran kepengurusan partai maupun dalam pencalegan pemilu 2009. Adapun yang menjadi syarat bagi seorang non Muslim untuk menjadi pengurus partai maupun sebagai caleg adalah mereka sudah mengenal karakter NU, memiliki komitmen untuk memajukan NU dan PKB, dan membangun komunikasi yang baik dengan NU yang sudah lama terbangun sehingga menjadi pertimbangan perekrutan.²⁴ Adapun pada pemilu 2009, proses rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan melalui seleksi Tim Mantap (Majelis Penetapan) dan dibantu oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dalam menyusun daftar caleg dan nomor urut. Menurut Ida Fauziyah yang saat Pemilu 2009 juga terlibat dalam proses penentuan nomor urut mengatakan bahwa proses seleksi caleg ditentukan oleh;

“Dilihat, kalau 2004 ada Tim Mantap, Dewan Syuro, Dewan Tanfidz kemudian ada representasi perempuan dan ada lembaga pemenangan pemilu kalau 2004. Pemilu 2009, pengurus DPP dan Dewan Syuro dan unsur LPP secara kolektif kolegal itu duduk bersama

²² Effendi Choirie, dalam Lili Romli., *op.cit.*, hlm.89

²³ Moch. Nurhasim, “Pengaruh dan Kekuatan Kyai dalam rekrutmen Politik” dalam Syamsuddin Haris (ed), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-LIPI, 2005), hlm.62

²⁴ Esty Ekawati, *Penerapan Affirmative Action dan Pola Rekrutmen Caleg PKB pada Pemilu 2009*, (Depok: Tesis UI, 2013), hlm.69

untuk melihat untuk menentukan. Saya termasuk ikut terlibat dalam menentukan nomor urut.”²⁵

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nomor urut misalnya didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasinya.

“soal pendidikan soal pengalaman *track record*-nya, soal pengalaman organisasinya, di NU apakah ada perannya, semakin tinggi record-nya maka semakin tinggi juga kita punya kriteria. Karena itu juga berpengaruh pada penempatan misalnya nomor urut. Kalau ia pimpinan organisasi, mahasiswa juga kemudian pimpinan di NU apalagi, lha berarti dia skornya makin tinggi karena harus ada ukuran ukuran yang seperti itu, yang bisa diukur meskipun pada akhirnya partai tetap punya pertimbangan yang sangat subjektif di akhir nanti karena misalnya melihat dinamika, melihat situasi yangmana itu harus memberikan celah untuk partai bisa ambil keputusan seperti itu.”²⁶

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa akibat konflik yang mendera elit politik PKB yang berdampak pada perpecahan cukup berpengaruh pada persiapan pemilu 2009. Hasil pemilu 2009 memang tidaklah mengejutkan, dimana banyak pihak yang sedari awal sudah pesimis bahwa PKB akan terjun bebas dalam pemilu 2009. Penurunan suara PKB cukup signifikan. Pemilu 2009 hanya menghasilkan 27 kursi di DPR RI. Konflik internal yang berimbas pada fragmentasi tahun 2008 menjadi serpihan cerita kelam PKB.

Tabel.1
Perolehan Suara PKB Hasil Pemilu (%)

Pemilu	Jumlah Suara	Prosentase	Jumlah Kursi di DPR RI
1999	13,336,982	12,61	51
2004	11,989,564	10,61	52
2009	5,146,122	4,95	27
2014	11,298,957	9,04	47

Sumber: data KPU

Melalui pembenahan struktur partai, sistem kaderisasi dan rekrutmen politik, PKB berupaya melakukan konsolidasi internal partai. Selain itu, PKB juga melakukan konsolidasi di tingkat Kyai-kyai pesantren yang sempat terpecah-pecah pada pemilu 2009. Peran Kyai-kyai ini penting bagi PKB karena bagaimanapun, pesantren (terutama di Jawa Timur) adalah lumbung suara PKB. Kyai

²⁵ Wawancara dengan Ida Fauziyah

²⁶ Wawancara dengan Luluk Nur Hamidah, Jakarta, 14 November 2012, pukul 09.45 wib

dan tokoh pesantren merupakan lahan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Dalam Pemilihan Umum, suara kyai dan santri-santrinya selalu diperebutkan bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya memperoleh dukungan dan simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan Kyai tersebut dapat menjadi *vote getter* dalam pemilu.

Darussalam mengungkapkan bahwa ada dua tipe Kyai/Ulama dalam politik yaitu;

“ada yang namanya (kyai) popularitas, ada yang namanya (kyai) elektabilitas. Kyai itu ulama-ulama besar itu kita jauh lebih mudah dalam pengangkatan popularitas, tapi elektabilitasnya belum tentu sama dengan popularitasnya. Salah satu contoh kenapa sih ada beberapa ulama yang satu dalam berpolitik itu bisa dituruti oleh jemaahnya, namun ada satu yang tidak dituruti oleh jemaahnya. Ini kenapa ada apa? Kalau ibarat di NU itu ada Kyai yang tidak turun gunung ya memang kerjanya ngajar dan ketika dia mendukung PKB maka santrinya pasti akan nurut, kenapa? Karena ia tidak berfikir pragmatis dan dia mengedepankan kesejahteraan santrinya. Nah Kyai yang berpolitik, ini hanya mementingkan dirinya sendiri, santrinya tidak dapat apa-apa, tidak dapat imbas dari politik itu sendiri. makanya akhirnya, dalam agama ia dituruti, namun dalam politik tidak dituruti oleh santrinya.”²⁷

Dari tipe-tipe Kyai tersebut bisa dibilang PKB berupaya untuk bisa merangkul kesemuanya yaitu Kyai yang memiliki popularitas dan juga Kyai yang memiliki elektabilitas. Upaya merangkul kyai-kyai tersebut (terutama Kyai khos) dilakukan PKB pasca Pemilu 2009 demi mewujudkan soliditas partai yang mengalami fragmentasi pada 2008.

Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif 2014, PKB menunjukkan peningkatan suara jika dibandingkan pemilu 2009. Keberhasilan PKB ini menurut Darussalam;

“sebetulnya peningkatan hasil pemilu 2014 kemarin tidak lepas dari struktur yang rapi, yang paling utama adalah kondusivitas partai politik itu sendiri, dan yang ketiga bagaimana partai di tingkatan masing-masing dalam perekrutan calon. Adapun dalam perekrutan calon, ada hal-hal yang diperhatikan yaitu popularitas calon, segi finansial dan segi jaringan.”²⁸

Selain merekrut dari kalangan internal PKB dan organisasi afiliasinya, PKB juga memberikan kesempatan bagi kalangan eksternal untuk bisa menjadi calon anggota legislatif PKB pada Pemilu 2014 yang lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Hanif Dhakiri bahwa PKB membuka peluang bagi pihak internal maupun eksternal PKB untuk bergabung,

“PKB memang memberikan prioritas kepada para tokoh masyarakat, artis, wartawan, kalangan akademisi dan lain – lain, namun kami juga memberikan peluang penuh pula kepada masyarakat umum yang ingin menjadi caleg di 2014 mendatang, yang terpenting

²⁷ Wawancara langsung dengan Darussalam, Pengurus DPP PKB dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, pada Senin, 1 Februari 2016, pukul 13.30 WIB

²⁸ Wawancara langsung dengan Darussalam, Pengurus DPP PKB dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, pada Senin, 1 Februari 2016, pukul 13.30 WIB

mereka memiliki elektabilitas dan kualitas dan bersedia untuk berkomitmen dalam membangun bangsa bersama PKB.”²⁹

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Darussalam mengenai perekrutan di Jakarta Selatan dimana PKB mencari calon yang bukan saja para aktivis-aktivis tapi juga tokoh-tokoh masyarakat dan pihak eksternal PKB/NU;

“hari ini contohnya di Jakarta Selatan, dalam perekrutan kita mencari yang berbasis bukan saja para aktivis-aktivis tapi juga tokoh-tokoh masyarakat kita rekrut. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penyeimbang informasi... Kalau di Jakarta lebih cenderung yang jadi di DPRD adalah orang-orang yang berafiliasi dengan NU tidak di luar. Kalau yang dari luar NU kemarin mungkin amunisi jaringannya, uangnya ketika dicalonkan di PKB tidak sekuat yang dari NU, meski secara hak mereka memiliki peluang yang sama. Kalau dari luar itu juga banyak, misalnya mereka tokoh, pengusaha, tapi tidak semuanya berhasil.”³⁰

Upaya kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan PKB pasca pemilu 2009 merupakan pembenahan internal sebagai bagian dari pelembagaan partai seperti yang diungkapkan oleh Panebianco bahwa pelembagaan adalah upaya menjadikan partai itu solid.

Perpecahan dan Kohesivitas Partai

Konflik merupakan keniscayaan bagi negara dengan sistem kepartaian yang multipartai, dimana beragam kepentingan politik bermain, tak terkecuali Indonesia. PKB adalah salah satu partai yang didera konflik internal setidaknya tiga kali sejak dekade pertama berdiri.

Periode pertama konflik internal PKB terjadi diawali dengan peristiwa pengajuan *impeachment* oleh anggota DPR (kecuali fraksi PKB dan FPDKB) terhadap Abdurrahman Wahid (Gusdur) sebagai presiden yang dianggap gagal dalam memberikan keterangan soal kasus Brunneigate dan Buloggate. Sebagai respon atas pemecatan terhadap dirinya, Gusdur melakukan manuver politik dengan melakukan pembubaran parlemen melalui Maklumat Presiden. Keputusan luar biasa Gusdur ini kemudian dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak berlaku. PKB kemudian mengajukan protes kepada MPR dengan cara membekukan fraksi PKB. Sebagai konsekuensi akan hal tersebut, fraksi PKB tidak akan menghadiri Sidang Istimewa MPR dengan agenda *impeachment* presiden. namun, meskipun fraksinya telah dibekukan, Matori Abdul Jalil (Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB) dengan dalih mencari alternatif solusi dan menyelamatkan muka Presiden, justru tampak hadir dalam SI MPR tersebut. Kedatangan Matori inilah yang mengakibatkan Ia dipecat dari PKB. Merasa tidak terima dengan pemecatan tersebut,

²⁹ Redaksi, Selain Merekrut Tokoh, PKB Juga Tak Menampik Caleg Dari Kalangan Umum. Diunduh dari <http://dpp.pkb.or.id/selain-merekrut-tokoh-pkb-juga-tak-menampik-caleg-dari-kalangan-umum>. diakses pada 17 Februari 2016, pukul 16.00 wib

³⁰ Wawancara dengan Darussalam

Matori dengan para pendukungnya membentuk PKB tandingan (PKB versi Matori) atau yang juga dikenal dengan PKB-Batu Tulis. PKB versi Gusdur kemudian mengangkat Alwi Shihab sebagai Ketua Umum PKB menggantikan Matori.³¹ Akibat konflik yang terjadi tahun 2001 ini, fokus partai dalam melembagakan serta menjaga hubungan baik antar anggota menjadi tidak ada, yang ada hanyalah perpecahan.

Konflik internal pasca *impeachment* Gusdur tampaknya cukup berpengaruh terhadap penurunan suara PKB hasil Pemilu 2004. Meski demikian, Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudoyono memberikan dua kursi menteri untuk PKB yaitu Alwi Shihab sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Akan tetapi, posisi kedua tokoh ini mendapat penentangan oleh Gusdur dengan alasan tidak boleh rangkap jabatan, mereka harus memilih, apakah partai atau pemerintahan. Akibatnya, Gusdur melakukan pemecatan terhadap kedua tokoh tersebut yang notabene Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Sekjen PKB. Pemecatan inilah menjadi periode konflik internal PKB jilid 2. Gusdur kemudian mengangkat Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz menggantikan Alwi Shihab. Dampak dari konflik jilid 2 ini melibatkan lebih banyak unsur PKB dan NU, dimana para Kyai *Khos* yang sebelumnya menjadi pendukung fanatik Gusdur (di konflik internal pertama) justru menyatakan dukungannya terhadap Alwi-Syaifullah. Ujungnya, konflik ini melebar hingga DPW PKB Jawa Timur juga beralih dukungan. Dan tentu saja ini merugikan Gusdur karena DPW PKB Jawa Timur merupakan mesin pendulang suara PKB di Jawa Timur.³²

Konflik internal PKB baik jilid 1 dan 2 dimenangi oleh Gusdur, sehingga pada 2005, berdasarkan hasil Muktamar PKB di Semarang, posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz diberikan kepada Muhaimin Iskandar. Dilain pihak, Kyai-Kyai *khos* pendukung Alwi-Syaifullah keluar dari PKB dan mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Menjelang pemilu 2009, bukannya menjaga soliditas partai, Gusdur justru melakukan pemecatan terhadap Muhaimin Iskandar sang Ketua Umum dengan dalih ketidakloyalan Muhaimin terhadapnya dan PKB. Pemecatan Muhaimin ini tidak melalui forum Muktamar melainkan hanya forum terbatas saja. Bahkan dalam forum tersebut Gusdur memberikan pilihan, apabila forum tidak setuju atas pemecatan Muhaimin maka Gusdur-lah yang akan meninggalkan PKB. Menghadapi pilihan tersebut, meskipun ketidakloyalan Muhaimin belum terbukti, forum terpaksa mengikuti kemauan Gusdur. Merasa pemecatannya tidak berdasar dan tidak konstitusional, Muhaimin dan para pendukungnya mengadakan Musyawarah Luar Biasa (MLB) pada Februari 2008 di Ancol dan

³¹ Lihat: Firman Noor., *op.cit.*, hlm.100-101

³² Lihat: Firman Noor., *op.cit.*, hlm. 103-104

menetapkan struktur kepengurusan baru PKB sehingga lebih dikenal dengan sebutan PKB versi Muhaimin atau PKB Ancol. Di lain pihak, Gusdur dan loyalisnya juga mengadakan MLB di Parung untuk menegaskan kepemimpinan baru PKB versi Gusdur atau lebih dikenal dengan PKB Parung.³³

Dari ketiga konflik internal PKB ini, nampaknya di konflik ketiga melawan keponakannya sendiri, Gusdur kalah cepat. Muhaimin lebih dulu mendaftarkan PKB-Ancol ke Kemenkumham untuk diverifikasi. Jika pada dua konflik pertama Gusdur yang menang maka untuk konflik ketiga ini Gusdur kalah oleh kecepatan tanggap Muhaimin. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2008 dinyatakan bahwa Muhaimin Iskandar-lah yang sah sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Konsekuensinya, PKB Muhaiminlah yang berhak mengikuti Pemilu 2009.

Putusan MA tentang PKB Muhaimin yang berhak mengikuti pemilu membuat partai ini harus ekstra cepat dalam mempersiapkan tahapannya. Meski proses rekrutmen calon anggota legislatif dari PKB dilakukan tidak seketat pada pemilu 2004, namun setidaknya PKB tetap melakukan seleksi yang melibatkan Tim Mantap dan LPP sehingga kualitas calon juga tetap terjaga. Konflik internal menjelang pemilu tentu berdampak luar biasa terhadap perolehan suara, namun pengalaman ini dijadikan PKB untuk bangkit dan membangun soliditas partai dikemudian hari. Ada upaya yang dilakukan PKB untuk menarik suara-suara dari kantong kyai/ulama menjelang pemilu 2009 dengan memanfaatkan forum Kyai/ulama kampung;

“ketika pertarungan antara PKB dengan PKNU, ulama-ulama besar di PKB keluar dan membentuk PKNU, itu tetapi kita potong, PKB potong dengan kita ambil yang kemudian kita bikin forum kyai kampung. Yang terdiri dari Kyai-kyai dari tingkatan bawah, kyai yang imam masjid, karena itu langsung mengakar ke bawah. Sehingga apa? Suara PKB walaupun turun tapi tetap stabil itungannya.”³⁴

Salah satu upaya yang kemudian dilakukan juga oleh PKB pasca pemilu 2009 adalah menjalin komunikasi kembali dengan Kyai-kyai *khos* dan kyai lainnya yang sempat terpecah-pecah pasca konflik 2005. Upaya-upaya menjaga soliditas atau kohesivitas partai akibat perpecahan yang terjadi penting dilakukan demi mewujudkan pelembagaan parpol yang baik. Manajemen konflik yang baik dilakukan oleh PKB dengan tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi antar anggota partai dalam setiap tingkatan dan silaturahmi (memberikan bantuan finansial dan program) kepada Nahdhatul Ulama (NU) sebagai pendukung utama PKB dilakukan demi kohesivitas partai. Hal ini seperti diungkapkan oleh Darussalam;

“komunikasi kita dengan NU beberapa kali memberikan program maupun bantuan lainnya. Salah satu manfaat nya, sebagai anak dari NU, anggap PKB adalah anaknya NU maka anggaplah PKB berbakti kepada NU. seperti apa? Ya kita membantu program-

³³ Lihat : Firman Noor, *op.cit.*, hlm.105

³⁴ Wawancara dengan Darussalam., *Log.cit*

program ke NU baik itu finansial ataupun program. Kalau PKB kan rutin membantu tiap bulannya.”³⁵

Setiap partai yang terdiri dari begitu banyak kader maka begitu banyak kepentingan juga ada di sana, baik kepentingan individu maupun kelompok. Berkaca dari ketiga konflik yang pernah terjadi di PKB, ini terjadi manakala faksi-faksi yang ada di dalam tubuh PKB merasa kecewa atau dirugikan. Keberadaan faksi tidak bisa dipungkiri dalam sebuah organisasi, namun bagaimana cara mengelola faksi supaya tidak berujung pada konflik itulah peran pemimpin partai. Dalam perjalannya, selain komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan antara PKB dengan NU dan para kadernya maka upaya menjaga kohesivitas/soliditas partai adalah dengan mengembangkan manajemen konflik. Terkait ada tidaknya faksi di PKB saat ini, Darussalam menjawab;

“... kalau itu kan kecanggihan dari ketua umumnya. Justru kalau tidak ada faksi maka tidak ada demokratisasi, karena tidak ada kekuatan yang berbeda, tergantung cara bagaimana pemimpin mengelolanya. Bisa ga? Misalnya bisa ga seorang pemimin mengayomi kelompok-kelompok yang berbeda yang ada didalamnya. Managemennya konfliknya bagus, kalau managemennya konfliknya berjalan maka mereka akan menikmatinya. hasilnya apa? Kalau negatif ya dalam nya kubu nya terpecah belah, kalau positif ya suaranya jadi maksimal. Sehingga bisa dilihat pemilihan ketua umumnya lancar tanpa hambatan karena manajemen konfliknya sudah berjalan. Hasilnya positif.”³⁶

Upaya silaturahmi dan komunikasi antar kader dan pihak NU yang dilakukan oleh PKB merupakan proses pelebagaan partai yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Panebianco, Randall&Svasand, dan Huntington bahwa pelebagaan adalah cara suatu organisasi menyebarkan nilai-nilai (ideologi), kemampuan beradaptasi termasuk kemampuan untuk bertahan dalam sebuah sistem politik, melakukan manajemen/penyelesaian konflik dengan baik (koherensi), dan menciptakan budaya dan sistem nilai yang penting dalam mewujudkan soliditas partai.

Penutup

Partai Politik merupakan instrument penting demokrasi. Jika partai politik menjalankan fungsinya dengan baik seperti fungsi rekrutmen politik dan manajemen konflik maka upaya pelebagaan partai politik akan berjalan dengan baik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang lahir di Era Reformasi sebagai tuntutan dari kalangan Nahdliyin (warga NU) untuk memiliki partai politik. Harapan tersebut kemudian diwujudkan oleh ulama/Kyai besar NU dengan membentuk PKB yang dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di kediaman KH.Abdurrahman Wahid di Ciganjur Jakarta Selatan. Deklaratornya terdiri dari tokoh-tokoh kunci dalam struktur PBNU yaitu:

³⁵ Wawancara dengan Darussalam

³⁶ *ibid*

KH.Ilyas Rukhiat (Tasikmalaya), KH.Munasir Ali (Mojokerto), KH Mustofa Bisri (Rembang), K.H Muchit Muzadi (Jember) dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Ketua Umum PBNU.

Dalam perjalanan politik dekade awal, tercatat PKB mengalami tiga konflik internal yang mengemuka ke publik. Konflik internal pertama terjadi pada tahun 2001 antara Gusdur dan Matori Abdul Jalil. Konflik kedua terjadi pada 2005 antara Gusdur dan Alwi Shihab. Konflik ketiga terjadi cukup memanas antara Gusdur dan Muhaimin Iskandar tahun 2008. Akibat dari konflik internal ini adalah penurunan perolehan suara PKB dalam setiap Pemilu. Meski demikian, pasca pemilu 2009 dimana suara PKB turun drastis, berbagai upaya pembenahan dilakukan oleh struktur PKB demi melembagakan kembali partai. Upaya-upaya pelembagaan partai yang dilakukan PKB dimulai dengan meneguhkan ideologi PKB yang sejak awal bukanlah partai Islam namun partai kebangsaan, terbuka dan inklusif. Oleh sebab itu, dalam perjalannya, PKB menerima kader dan caleg dari kalangan non-Muslim.

Langkah selanjutnya yang dilakukan PKB adalah dengan membangun komunikasi dan silaturahmi dengan para Kyai/ulama NU yang sempat terpecah-pecah pada konflik sebelumnya. Merangkul kyai penting dilakukan karena kyai memiliki santri-santri yang dalam politik merupakan potensi lumbung suara atau sumber dukungan suara dalam pemilu. Selain itu, PKB juga melakukan upaya kaderisasi dengan melibatkan organisasi/badan otonom yang berafiliasi dengan PKB dan NU seperti Pemuda Anshor, Fatayat dan Muslimat NU, PMII, Garda Bangsa dan lain-lain. Kaderisasi ini penting dilakukan supaya dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu, PKB tidak kesulitan dalam menjaring calon. Meski sebagian besar kader dan caleg PKB adalah dari NU namun PKB tidak menutup kesempatan bagi pihak eksternal untuk bergabung dengan PKB.

Upaya maksimal yang dilakukan oleh PKB dalam membenahi stuktur dan kondusivitas partai serta kemampuan pemimpin dalam mengelola faksi-faksi berdampak baik dalam pelembagaan partai politik. Apa yang terjadi di PKB pasca Pemilu 2009 dan hasil pemilu 2014 yang menunjukkan tren peningkatan memperlihatkan bahwa PKB telah berupaya membangun kohesivitas atau soliditas partai.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Ekawati, Esty. 2013. *Penerapan Affirmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2009*. Depok: Tesis UI

Hajar, Ibnu. 2009. *Kiai ditengah Pusaran Politik, Antara Petaka dan Kuasa*. Jogjakarta: IRCiSoD

Haris, Syamsuddin (ed). 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-LIPI

Noor, Firman. 2015. *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press.

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik Sebuah Pemjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendiidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Randall, Vicky and Lars Svasand. 2002. *Party Institutionalization in New Democracies*, London: Sage Pulication, Party Politics, Vol.8, No.1.

Romli, Lili (ed). 2008. *Pelebagaan Partai Politik Pasca Orde Baru: Studi kasus Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS*. Jakarta: LIPI Press.

Sartori, Giovanni. 2005. *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*. UK: ECPR Press.

Zaro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU*. Jogjakarta: LKiS

Mabda Syiasi Partai Kebangkitan Bangsa. 2004. Jakarta; DPP PKB

<http://pkbkedungreja.com/2011/03/sejarah-berdirinya-pkb.html>.

<http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian>

Wawancara dengan Ida Fauziyah, Anggota DPR RI Fraksi PKB. Jakarta, 21 November 2012, pukul 11.30 WIB

Wawancara dengan Luluk Nur Hamidah. Pengurus DPP PKB. Jakarta, 14 November 2012, pukul 09.45 WIB

Wawancara dengan Darussalam, Pengurus DPP PKB dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, pada Senin, 1 Februari 2016, pukul 13.30 WIB